

TINGKAT PREVALENSI DAN FAKTOR-FAKTOR DETERMINA N KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN LEMBATA, NTT (Bagian dari Tesis)

Hasan Ibrahim

Program Studi Manajemen Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Jl. Adisucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

ABSTRACT

The quality life of a family is describing the level of welfare. The better the family quality, the higher the level of welfare. This research was conducted in Sub districts of Nubatukan and Ille Ape, Lembata Regency, East Nusa Tenggara Timur. The objectives of this research were: to measure the prevalence level of poor family and to analyze the factors which related with family welfare level. A hundred families are used as sample which is chosen by purposive random sampling and stratified random sampling method. On the studied location, the variety of poverty prevalency depend on the indicator used, which, 66% (BPS Indicators), 78% (BKKN Indicators), and 31% (subjective indicators). Factors which are significantly ($p < 0.05$) related with welfare is sex. Level of education, and profetion (job) of family leader.

Key words: Welfare, Poverty, Prevalence.

PENDAHULUAN

Sejak terjadi krisis secara nasional berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dan proporsi penduduk miskin per maret 2006 (BPS 2006) masih relatif tinggi yakni sebesar 39,05 juta jiwa (17,75%) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 (35,1 juta jiwa atau 15,97%). Salah satu faktor penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat subsidi ditarik pemerintah. Di sisi lain program-program tersebut lebih bernuansa untuk mencegah terjadinya penurunan kesejahteraan yang lebih buruk (*safety net program*).

Tingkat kesejahteraan di Kabupaten Lembata selama tahun 2003-2003 mengalami penurunan. Pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin adalah 27112 jiwa (BPS 2004b) atau meningkat sebesar 43,98%. Meningkatnya jumlah keluarga miskin menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum efektif. Belum efektifnya program pengentasan kemiskinan tersebut, diduga salah satu penyebabnya adalah intervensi program pengentasan kemiskinan yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diajukan 2 *research question* yakni: 1) bagaimana tingkat prevalensi kemiskinan menurut indikator BPS, BKKN, dan subyektif, 2) faktor-faktor apa yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi kesejahteraan keluarga menurut indikator BPS, BKKN,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya utuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2M.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2M.





subyektif dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di kabupaten Lembata selama 3 bulan, desain penelitian ini adalah *cross sectional*. Metode *sampling* adalah *purposive sampling* untuk menentukan 2 sampel kecamatan selanjutnya masing-masing kecamatan dipilih 2 sampel desa. Pertimbangan yang digunakan untuk mengambil sampel kecamatan dan desa adalah tingkat prevalensi kemiskinan tertinggi menurut indikator BPS.

Tahap berikutnya adalah memilih 25 keluarga dari desa sampel secara *stratified random sampling*. Stratifikasi dilakukan berdasarkan strata tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN. Total sampel penelitian adalah 100 keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prevalensi kemiskinan

Tingkat prevalensi kemiskinan di lokasi penelitian berbeda-beda menurut indikator kemiskinan yang digunakan. Persentase keluarga miskin menurut indikator BPS, BKKBN, dan subyektif masing-masing adalah 66%, 78%, dan 31%. Sedangkan persentase keluarga tidak miskin menurut setiap indikator tersebut adalah 34%, 22%, dan 69%.

Pengukuran tingkat prevalensi kemiskinan di lokasi penelitian menggunakan garis kemiskinan yang sama antara desa (Ile Ape) dan kota (Nubatukan) yakni Rp 99625/kap/bulan). Hal ini menyesatkan karena standar kebutuhan hidup di Nubatukan lebih tinggi (Rp 105825) sedangkan di Ile Ape hanya (Rp 86481). Indikator BPS menurut World bank (1990) dalam Raharto dan Romdiati (2000) tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan secara total karena mengabaikan faktor kesehatan, harapan hidup, kemampuan baca tulis, akses terhadap fasilitas umum dan sumber pemilikan bersama.

Keluarga miskin versi indikator ALEK (BKKBN), telah memenuhi pangan secara kuantitas tapi belum seluruhnya memperhatikan aspek gizi dalam penyediaannya (0% keluarga makan kurang dari 2 kali sehari dan 21,79% belum mengkonsumsi protein hewani selama seminggu). Keluarga miskin relatif mampu dari sisi sandang, karena hanya 1,28% anggota keluarga yang tidak mengenakan pakaian berbeda untuk di rumah, sekolah/bekerja, atau bepergian dan sekitar 41,02% tidak membeli pakaian baru setahun terakhir. Keluarga miskin belum mampu dari sisi papan, karena masih banyak keluarga miskin yang memiliki lantai dari tanah (64,10%) serta rumah yang tidak berkualitas (56,41% luas lantai per penghuni kurang dari 8%.

Pendekatan yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan keluarga adalah perspektif fenomenologi, artinya berdasarkan fenomena yang muncul di masyarakat (Bogdan and Taylor dalam Tim peneliti 1994). Tingkat kesejahteraan versi subyektif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Tingkat kesejahteraan keluarga menurut indikator subyektif

Indikator kesejahteraan	Tingkat kesejahteraan	
	Tidak sejahtera	Sejahtera
Pendapatan	87,2%	12,8%
Harga	89,7%	10,3%
Aset	93,6%	6,4%
Agama	15,5%	84,6%
Budaya	62,8%	37,2%

pengaruh negatif dari lingkungan tetapi karena keluarga tidak menjalankan agama menurut keyakinannya.

Hubungan antara faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan.

Faktor demografi yang dianalisis dalam tulisan ini adalah jenis kelamin kepala keluarga, sedangkan faktor sosial ekonomi adalah pendidikan kepala keluarga dan pekerjaan kepala keluarga. Hubungan antara setiap faktor tersebut dengan indikator BPS, BKKBN, dan subyektif dianalisis dengan khi kuadrat.

Sebagian besar KK di lokasi penelitian dipimpin oleh laki-laki (77%) dan 23% dipimpin oleh perempuan. Menurut indikator BPS, keluarga miskin yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan relatif sama (66% vs 65%). Sedangkan keluarga miskin versi indikator BKKBN dan subyektif umumnya dikepalai oleh perempuan (87% vs 47%). Analisis khi kuadrat menunjukkan bahwa jenis kelamin kepala keluarga berhubungan tidak nyata ($p > 0,05$) dengan indikator BPS maupun BKKBN sedangkan berhubungan nyata ($p < 0,05$) dengan kesejahteraan. Hal ini dapat dipahami karena selain melakukan tugas domestik juga mencari nafkah sehingga peluang miskin besar.

Persentase pendidikan kepala keluarga miskin digolongkan menjadi 2, yakni $< \text{SMA}$ dan $\geq \text{SMA}$. Persentase pendidikan KK miskin menurut ketiga indikator tersebut adalah $< \text{SMA}$, untuk BPS (76%), BKKBN (83%), dan subyektif (34%). Artinya KK miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan kepala keluarga berhubungan nyata ($p < 0,05$) dengan kesejahteraan indikator BPS dan BKKBN tetapi tidak nyata ($p > 0,05$) menurut indikator subyektif. Pendidikan adalah *first order condition* bagi keluarga dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya (Syarief 1997).

Tingkat pendapatan yang diperoleh keluarga tergantung jenis pekerjaan yang digeluti kepala keluarga. Jenis pekerjaan kepala keluarga bervariasi, tetapi untuk kepentingan analisis jenis pekerjaan KK dibagi menjadi petani dan bukan petani. Sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai petani, indikator BPS (76%), indikator BKKBN (85%) dan subyektif (36%). KK yang bekerja sebagai petani akan memperoleh pendapatan yang relatif rendah dan mudah menjadi miskin (Pritchett *et al* 2000).

Tabel 1 menjelaskan bahwa keluarga miskin di lokasi penelitian merasa sejahtera karena pendapatan, aset, dan budaya yang dimiliki serta harga yang berlaku di pasar. Namun merasa tidak sejahtera karena agama yang dimiliki. Ketidaksejahteraan karena indikator agama, bukan karena

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2M.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2M.





KESIMPULAN

1. Tingkat prevalensi kemiskinan berbeda-beda menurut indikator kemiskinan yang digunakan. Indikator BPS dan BKKBN menggolongkan keluarga miskin lebih tinggi daripada tidak miskin, masing-masing adalah 64% (indikator BPS), 78% (indikator BKKBN). Sebaliknya indikator subyektif menggolongkan keluarga miskin lebih rendah yakni (31%).
2. Faktor demografi yang berhubungan nyata ($p < 0,05$) dengan kesejahteraan adalah jenis kelamin kepala keluarga. Sementara faktor sosial ekonomi yang berhubungan nyata ($p < 0,05$) dengan kesejahteraan adalah pendidikan dan pekerjaan kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS). 2004b. Lembata dalam Angka 2003. Kabupaten Lembata.
- Pritchett, L., Suryahadi, A., Sumarto, S. 2000. *Quantifying Vulnerability to Poverty. A Proposed Measure, Applied to Indonesia. Social Monitoring and Early Response. The World Bank Unit Jakarta.*
- Raharto, A., Romdiati, H. 2000. Identifikasi Rumah Tangga Miskin. Dalam Widyakarya Pangan dan Gizi VII LIPI.
- Syarief, H. 1997. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas. Suatu Telaah Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Faperta IPB.
- Tim Peneliti. 1994. Evaluasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kumuh di DKI Jakarta. Kerjasama Lembaga Demografi UI dan Biro Bina Pemerintahan DKI Jakarta